

Epistemologi Pancasila

Dr. A.M.W. Pranarka

Ketua Dewan Direktur CSIS, Anggota DPA RI, Ketua Majelis Kebudayaan
Taman Siswa, dan Staf Pengajar S2 Program Studi Ilmu Filsafat UGM

Pancasila tidak lahir
sebagai sebuah sistem epistemologi.

Pancasila lahir sebagai dasar negara, merupakan
sebuah ideologi dan memuat suatu pandangan hidup.

Dan itu terjadi pada tahun 1945. Epistemologi lahir jauh sebelum
abad ke-20, jauh sebelum lahirnya Pancasila. Dari catatan sejarah,
epistemologi telah melintasi masa perkembangan yang sangat
lama, sejak usaha para Sophis pada jaman Yunani Kuno,
menjadi bidang studi yang utama pada Jaman Kritik
(Descartes, Kant), sampai perkembangan terkini
yang menempatkan kajian epistemologis
menjadi amat terkait dengan struk-
tur, dengan sistem, dan
dengan kekuasaan

Sesungguhnya dewasa ini kita
berada di dalam situasi krisis epistemologi
secara mendasar, sebagai bagian dari krisis
posisi filsafat yang juga mempunyai sifat
mendasar. Positivisme, yang saat ini me-
nemukan kekuatannya pada perkem-

bangun ilmu-ilmu empiris numerikal
manunggal dengan ekonomi dan teknologi,
sebetulnya telah menempatkan dunia fal-
safah pada batas akhir dari eksistensinya.
Positivisme seperti itu memang akan dapat
tumbuh menjadi merajalela, dan menjadi

sistem kekuasaan yang akan dapat memakamkan manusia dan kemanusiaan. Hanya kebangkitan falsafah yang kuat dan sekaligus memiliki kredibilitas dan efektivitas akan dapat membawa situasi pada garis perkembangan yang diletakkan kembali pada manusia sebagai akar konvergensi dan konsentrisitasnya.

Di kalangan para ahli falsafah kadang-kadang terdapat suatu permasalahan mengenai hubungan antara epistemologi dan ontologi: manakah yang lebih dahulu, manakah yang menjadi titik gravitasi dari falsafah sebagai sistem.

Apabila falsafah adalah sebuah sistem pengetahuan, maka sudah barang tentu epistemologi -- yang secara umum dapat kita definisikan sebagai teori mengenai pengetahuan didasarkan atas refleksi yang radikal, komprehensif, dan integralistik -- merupakan bagian dari langkah awal. Legitimasi falsafah -- bahkan legitimasi ilmu, ideologi, teknologi, theologi -- menemukan pondasinya pada epistemologi itu.

Namun apabila kemudian berbicara mengenai sifat-sifat pengetahuan, dan men-yaksikan kompleksitas masalah kriteria kebenaran dan kepastian, tak pelak lagi pengetahuan harus ditempatkan pada struktur dasar ontologik yang mendukungnya, sehingga dengan demikian ontologi itulah akhirnya yang menentukan epistemologi.

Di dalam medan permasalahan seperti ini kiranya perlu sekali membedakan antara falsafah dasar dan falsafah spesial, antara epistemologi dasar dan epistemologi spesial.

Epistemologi dasar berusaha meletakkan pondasi yang tak tergoyahkan bagi legiti-masi falsafah, bahkan legitimasi segala pengetahuan sistematis. Problem fundamental di dalam epistemologi dasar adalah problem skeptisme. Epistemologi dasar harus menjawab pola pikir skeptik berkenaan dengan pengetahuan.

Problem skeptisisme adalah problem mengenai eksistensi pengetahuan. Sebagaimana diketahui, masalah tersebut hanya dapat dipecahkan melalui argumentasi atau refleksi melalui restorsi, yaitu yang meragukan pengetahuan pada hakikatnya mengakui adanya pengetahuan. Artinya skeptisisme fundamental mengenai pengetahuan mempunyai sifat *self contradictory*, 'karena saya mengetahui bahwa saya tidak mengetahui', yang juga berarti 'saya mengetahui bahwa saya mengetahui'.

Sebetulnya pondasi inilah yang dapat menjadi basis metodologi refleksi selanjutnya. Dan sebetulnya pada dasarnya memang hanya ada satu basis dasar yang menjadi dasarnya segala pengetahuan, yaitu kesadaran bahwa saya mengetahui. Produk-produk refleksi selanjutnya sudah merupakan proses tahap lebih lanjut.

Dari analisa terhadap apa yang disebut oleh Marechal sebagai *le point du depart* tersebut dapat diangkat terlebih dahulu beberapa dalil-dalil yang benar dan pasti secara epistemologis, seperti misalnya: *the principle of identity* dan *the principle of negative the principle of contradiction*, *the principle of evolution*, mengenai relasi (hubungan), tentang potensialitas dan aktualisasi, tentang finalitas, causalitas, tentang *reasoning* sumber-sumber pengetahuan dan lain sebagainya lagi, yang semuanya juga memberi pondasi legitimasi porsi pengetahuan manusia.

Atas temuan-temuan tersebut (yang kadang-kadang dinamakan *veritates primarise*) kemudian dapat memasuki refleksi lebih lanjut seperti misalnya mengenai jenis-jenis pengetahuan (ada mitologi, falsafah, theologi, ilmu, ideologi dan teknologi), sehingga dapat mengadakan refleksi mengenai deduksi, induksi, metodologi, yang mungkin menjadi makin bercabang-cabang dan menjadi makin bersifat dan berlingkup spesial.

Atas temuan-temuan tersebut pula (melalui refleksi fenomenologi dengan

memperbandingkan berbagai pengalaman dasar di dalam proses pengetahuan) seseorang dapat memasuki refleksi kritik yaitu mempermasalahkan kriteria epistemologi mengenai benar dan tidak benar, kepastian dan lain sebagainya. Tidak jarang banyak aliran yang pada dasarnya menolak skeptisisme akan tetapi melalui ajaran mereka mengenai kriteria tentang benar dan tidak benar, pasti dan tidak pasti, atau teori mengenai pengetahuan yang mereka kemukakan, implikasinya adalah jatuh ke dalam skeptisisme itu pula. Misalnya saja relativisme dogmatisme, determinisme ekonomi, determinisme struktural, determinisme sosiologis, determinisme sejarah, termasuk rasionalisme, idealisme, positivisme dan lain-lainnya.

Begitu pula halnya dengan ajaran-ajaran anti sistem, anti struktur, ataupun implikasi postmodernisme di dalam bidang epistemologi.

Phenomenologi dan eksistensialisme, yang kemudian diperkuat oleh personalisme dan antropologi kefilosofatan, telah memberikan sumbangan yang besar yaitu menempatkan pengetahuan (dan segala proses maupun produk pengetahuan itu) di dalam konteks eksistensi manusia. Maka pengetahuan tidak hanya ditempatkan secara deterministik pada ratio, empiri, *will power* ataupun *consciousness*, akan tetapi sebagai bagian dari evolusi dan aktualisasi eksistensi, dengan berbagai dimensi-dimensinya. Pendekatan esentialistik (baik dari garis intelektualisme maupun voluntarisme) digantikan dengan pendekatan eksistensialistik. Eksistensi manusia menjadi basis ontologisnya perkembangan (dan karena itu juga pengembangan) pengetahuan, dalam berbagai jenis maupun cakupannya.

Karena eksistensi itu menyejarah, maka pengetahuan manusia juga mempunyai sifat menyejarah (historisitas). Ada evolusi. Karena eksistensi itu selalu berupa ko-eksistensi, maka pengetahuan manusia

mempunyai sifat kebersamaan (sosialitas). Karena eksistensi dan koeksistensi itu berada di dalam struktur dan berada di dalam sistem eksistensi, maka pengetahuan itu pun selalu bergerak melalui struktur dan sistem, walaupun semua itu berada di dalam gerak dan proses aktualisasi eksistensi yang terus menerus. Ada dialektika. Ada komunikasi. Di dalam gerak seperti itu pengetahuan dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang secara konstitutif membentuk eksistensi manusia. Pengetahuan bergerak di dalam tegangan antara dinamika dan keterbatasan (waktu, tempat). Manusia dapat keliru, manusia dapat benar, kepastian dapat berkurang, kepastian dapat bertambah. Perennialitas dari sistem pengetahuan menjadi absurd dan irrelevan.

Di dalam perkembangan ini maka sekat-sekat struktural dogmatik yang pada waktu-waktu lalu diciptakan manusia untuk membuat batas kedaulatan secara buta antara filsafat, ilmu, theologi, ideologi, teknologi, telah mengalami perubahan dan transformasi: manusia sekarang tidak berbicara lagi mengenai separasi antara berbagai jenis pengetahuan tersebut akan tetapi mengenai diferensiasi dan interaksi.

Dengan refleksi epistemologis dan ontologis seperti itu maka falsafah akan dapat tidak saja memberikan legitimasi terhadap jenis-jenis pengetahuan manusia lainnya, akan tetapi juga dapat memberikan kerangka acuan pemahaman yang radikal (yaitu menunjukkan akarnya) komprehensif dan integral dari berbagai jenis pengetahuan itu dan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Apalagi evolusi kesadaran pengetahuan manusia dewasa ini juga makin bergerak ke depan, sehingga dimensi furutistik menjadi dimensi yang masuk ke dalam refleksi kefilosofatan, khususnya epistemologi.

Melalui proses seperti ini maka falsafah dasar akan menjadi basis bagi falsafah spesial, dan falsafah spesial akan

memberikan koroborsi komprehensif dan radikal tidak saja mengenai adanya jenis-jenis pengetahuan, akan tetapi juga menjadi proses refleksi radikal, komprehensif dan integral bagi berbagai cabang ilmu, baik itu *natural sciences*, *social sciences*, bahkan juga ideologi, theologi dan teknologi. Ini semua tentu saja membawa beban yang cukup besar bagi mereka yang ingin membangun dunia kefilosofatan, karena pelaksanaan tugas pendampingan tersebut akan meminta pengetahuan yang cukup komprehensif dan integral pula dari berbagai bidang ilmu yang akan menjadi pusat perhatiannya. Sebab hanya melalui proses seperti ini kredibilitas dan efektivitas pemikiran kefilosofatan akan diakui eksistensinya.

Hubungan Antara Epistemologi dan Pancasila

Ada dua macam hubungan sekurang-kurangnya antara epistemologi dan Pancasila: pertama, Pancasila berkedudukan sebagai obyek epistemologi; kedua, Pancasila menjadi faktor yang memberi spesifikasi terhadap epistemologi (seperti orang dapat berbicara tentang epistemologi Aristoteles, Skolastik, Kantian, Hegelian, Marxis dan lain sebagainya).

Yang jelas hubungan antara Pancasila dan epistemologi tidaklah termasuk ke dalam medan falsafah dasar atau epistemologi dasar. Artinya orang yang membicarakan Pancasila (baik yang negatif maupun yang positif) sudah mengandaikan bahwa ia mengetahui. Ia tidak permasalahan lagi problem *de existentia cognitionis et veritatis*.

Dengan kata lain, berbicara mengenai hubungan antara epistemologi dan Pancasila adalah berbicara di dalam medan epistemologi spesial.

Pancasila tentu saja merupakan produk dan sebuah proses pengetahuan. Namun proses pengetahuan di dalam terjadi-

nya Pancasila itu memang tidak dikemukakan secara eksplisit. Pancasila pada hakikatnya lebih merupakan dalil-dalil ontologik. Bangsa Indonesia dapat mengadakan rekonstruksi proses epistemologi yang melahirkan Pancasila, kita juga dapat mengadakan telaah epistemologis untuk mengungkapkan substansi ontologik yang terkandung di dalam Pancasila itu.

Beberapa Problem Epistemologik mengenai Pancasila

Melalui penegasan tekad dan kemauan untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, maka Orde Baru dapat kita pandang sebagai sebuah tahapan kritik di dalam pemikiran mengenai Pancasila. Salah satu konsekuensi dari kemauan seperti itu tentulah dituntutnya kemampuan untuk menunjukkan kriteria guna membedakan mana Pancasila yang murni dan yang tidak murni, mana pelaksanaan yang konsekuen dan tidak konsekuen.

Walaupun demikian hal tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa sifat kritik di dalam pemikiran mengenai Pancasila belum terjadi sebelumnya. Bahkan perumusan Pancasila itu sendiri kiranya merupakan produk dari sebuah proses kritik, sekurang-kurangnya dengan mengadakan komparasi dan analisa implikasi dari konsep-konsep yang didiskusikan pada waktu itu.

Ada beberapa problematik epistemologik berkenaan dengan Pancasila, di antaranya adalah :

1. Masalah proses terjadinya Pancasila sebagai dasar negara, terutama dari pendekatan epistemologisnya;
2. Masalah sumber;
3. Masalah Tafsir;
4. Masalah Pelaksanaan;
5. Masalah Perubahan;
6. Masalah Komparasi;
7. Posisi Pancasila sebagai ideologi dan falsafah.

Masalah Proses

Pada saat persiapan maupun penugangan dan penetapan Pancasila sebagai dasar ne-gara, tidak ada satu pembahasan pun yang mengetengahkan proses epistemologis yang ditempuh pada waktu itu. Orang tidak mulai dengan membicarakan metoda ataupun kerangka teoritis. Namun jelas bahwa terjadinya Pancasila itu didukung sebuah proses refleksi epistemologis yang sifatnya tidak eksplisit. Oleh karena itu salah satu problem epis-temologik saat ini kiranya adalah mengeksplisitkan proses kognitif intelektual yang mendukung proses terjadinya Pancasila sebagai dasar negara.

Metodologi merupakan wahana melalui mana orang ingin memecahkan masalah. Salah satu problem yang dihadapi pada saat perjuangan mencapai Indonesia Merdeka adalah problem pluralisme dan kompleksitas. Ada banyak aspirasi, ada banyak pendekatan, ada banyak cita-cita, ada banyak kelompok. Semua ini membuat perjalanan mencapai Indonesia Merdeka itu nanti, kekuasaan ada di tangan siapa dan untuk siapa; legitimasi di dalam Indonesia Merdeka ada di tangan siapa.

Berdampingan dengan problem kemajemukan dan kompleksitas terdapat keinginan dan kemauan akan satu Indonesia Merdeka. Maka masalahnya adalah memecahkan problema antara kemajemukan dan kompleksitas di satu pihak dengan persatuan di lain pihak. Pendekatan atau cara berpikir di dalam menghadapi masalah ini nampaknya bukan pendekatan dialektika negatif, akan tetapi pendekatan dialektika positif, dalam rangka membangun persatuan yang kuat atas dasar kemajemukan dan kompleksitas. Salah satu dalil di dalam memecahkan masalah tersebut adalah apa yang dikemukakan oleh Ki Hadjar, yang anatara lain mengatakan: jangan mempersatukan yang tidak dapat disatukan, jangan mempersatukan yang tidak perlu dipersatukan: satukanlah yang

me-mang dapat dan perlu, yaitu persatuan di dalam dasar-dasarnya.

Dengan kata lain, metoda yang diikuti di dalam proses ini adalah metoda membangun titik temu yang sifatnya mendasar, yang dibangun atas dasar kemajemukan dan kompleksitas yang ada, yang mungkin dapat disebut sebagai metoda kritis selektif dialektif eksperimental. Sebetulnya pendekatan ini tidak lain adalah pendekatan bhinneka tunggal ika. Atas dasar itulah lalu dibangun titik temu mendasar bagi terwujudnya In-donesia Merdeka, yang antara lain adalah kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadil-an sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dituangkan menjadi dasar negara di dalam Pembukaan Konstitusi Bangsa Indonesia menjadi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bhinnekatunggalika menjadi basis ontologis dan sekaligus juga menjadi panduan proses epistemologis yang melahirkan Pancasila sebagai dasar negara.

Masalah Sumber

Masalah ini menjadi tajam pada awal Orde Baru. Manakah sumber Pancasila yang murni? Ada kontroversi mengenai hal ini baik kontroversi akademik maupun terutama kontroversi politik. Pemecahan di dalam hal ini berpegang kepada konsep Pancasila sebagai dasar negara. Atas dasar inilah maka dikonsensuskan bahwa sumber darimana kita mengetahui adanya Pancasila sebagai dasar negara adalah Pembukaan UUD 1945. Hal ini antara lain tentu saja untuk mengatasi perbedaan pendapat: ada yang mengatakan sumber Pancasila adalah Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945, ada pula yang mengemukakan sumbernya

adalah pidato Muh. Yamin atau pidato Supomo, ada pula Dekrit 5 Juli 1950 ataupun Piagam Jakarta. Penegasan bahwa sumber Pancasila dasar negara adalah Pembukaan UUD 1945 memang tidak perlu diartikan untuk tidak mengakui adanya pi-dato 1 Juni. Dalam hal ini kriterianya adalah dasar negara yang mengikat seluruh bangsa dan juga yang membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Pidato 1 Juni memang historis ada. Namun pidato itu belum atau tidak memuat Pancasila sebagai dasar negara.

Masalah Tafsir

Pancasila sebagai dasar negara harus ditafsirkan, apabila karena Pancasila hanya memuat rumusan-rumusan yang singkat dan mendasar. Melalui tafsir maka Pancasila selanjutnya akan dapat dimengerti dan kemudian dilaksanakan.

Salah satu pertanyaan adalah siapakah yang mempunyai hak menafsirkan Pancasila dan bagaimanakah mekanismenya? Siapakah yang dapat menentukan kriteria patokan apakah tafsir Pancasila itu benar atau tidak?

Dalam hal ini perbedaan seperti halnya di dalam masalah sumber menjadi amat penting. Sebagai dasar negara, maka hak menafsirkan Pancasila ada di tangan seluruh rakyat, karena Bangsa Indonesia menganut paham demokrasi atau kedaulatan rakyat. Namun kedaulatan rakyat itu hanya dapat berjalan melalui struktur dan organisasi. Dalam hal ini Bangsa Indonesia mempunyai MPR, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Di dalam MPR ada terdapat Pemerintahan, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, DPA dan BPK. Tafsir Pancasila yang mempunyai sifat kenegaraan dan mengikat seluruh rakyat adalah tafsir yang dilaksanakan melalui jalur dan mekanisme konstitusional, diselenggarakan secara demokratis dan didasarkan atas hukum.

Hal tersebut adalah untuk menga-

tasi adanya banyak tafsir mengenai Pancasila walaupun pendekatan ini tentu juga tidak melarang adanya berbagai tafsir Pancasila di-lakukan oleh orang perorang ataupun masyarakat. Namun hanya ada satu tafsir yang mempunyai sifat kenegaraan, yang dilaksanakan dengan berpegang kepada konstitusi, demokrasi dan hukum. Ini berarti bahwa di luar itu tentu ada banyak tafsir seperti misalnya tafsir Notonagoro, tafsir Dryarkara, tafsir Ki Hadjar Dewantara dan lain sebagainya lagi. Orang tentu saja diperbolehkan untuk menerapkan prinsip hermeneutika di dalam melakukan tafsir Pancasila. Tafsir-tafsir di luar yang konstitusional itu sifatnya adalah pribadi, walaupun tentu saja dapat dipandang sebagai bagian dari proses membangun konsensus dalam rangka membuat tafsir secara bersama.

Masalah Pelaksanaan

Pancasila tidak hanya harus ditafsirkan akan tetapi harus dilaksanakan. Ideologi mengalami transformasi menjadi ideopraxis. Praxis ini menjadi amat penting karena kredibilitas dan efektivitas Pancasila tergelar dan terjadi di dalam praxis tersebut. Praxis ini tentu saja haruslah ditentukan melalui mekanisme berdasar kepada konstitusi, demokrasi dan hukum. Batang Tubuh UUD tidak hanya merupakan panduan bagi tafsir akan tetapi terutama bagi pelaksanaan Pancasila itu. Pelaksanaan Pancasila yang dapat kita sebut sebagai aktualisasi kontekstual Pancasila tentu saja memerlukan sistem dan organisasi, karena tidak hanya menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah melainkan menjadi tanggung jawab dan kewenangan masyarakat, rakyat. Di sini mekanisme demokrasi menjadi makin penting, termasuk prinsip musyawarah, dalam arti bersama-sama membicarakan masalah-masalah berkenaan dengan aktualisasi kontekstual Pancasila ini. Dalam lingkup ini maka metodologi aktualisasi Pancasila sebagai ideologi adalah strategis.

Masalah Perubahan

Implementasi Pancasila mungkin lebih tepat ditempatkan di dalam pendekatan eksistensialistik daripada esensialistik. Artinya implementasi itu merupakan gelar terus menerus dari aktualisasi dai Pancasila yang dilaksanakan bersama oleh rakyat Indonesia.

Pendekatan eksistensialistik juga mengisyaratkan bahwa aktualisasi Pancasila tersebut adalah proses yang bergerak terus, sejalan dengan gerak berubahnya alam dan jaman. Masyarakat bergerak. Jaman berkembang. Pancasila yang dituangkan di dalam Pembukaan pada tahun 1945 harus dilaksanakan, diaktualisasikan pada tahun-tahun berikutnya, bahkan makin jauh dari tahun 1945 itu (misalnya tahun 1996 sekarang ini). Di sini kita menghadapi masalah : antara ortodoksi dan aktualisasi. Ortodoksi artinya kita harus setia berpegang kepada Pancasila murni. Aktualisasi artinya kita harus menjabarkan Pancasila sesuai dengan tuntutan kontekstual perkembangan alam dan jaman. Maka harus ada jembatan antara ortodoksi dan aktualisasi. Harus ada dialog antar ortodoksi dan aktualisasi. Tafsir Pancasila harus selalu dinamis-kreatif. Pelaksanaan Pancasila harus ditentukan melalui strategi yang antisipasif dan futuristik.

Mengenai hal ini konstitusi memberikan pedoman, dalam bentuk amanat bahwa MPR sekali dalam 5 tahun harus meneliti segala aliran yang ada, untuk kemudian menentukan haluan perjuangan bangsa. Institusi MPR seperti itu mengisyaratkan betapa Konstitusi menghendaki adanya kehidupan bangsa dan negara yang mempunyai daya dinamika yang tinggi, sebab basis dari MPR tidak lain adalah rakyat, masyarakat.

Termasuk didalam problem ini tentu saja adalah masalah apakah Pancasila dapat dirubah atau tidak membawa masalah

teoretik dan masalah politik. Secara teoretis Pancasila tentu saja dapat berubah, dapat diganti. Namun diganti atau dirubahnya Pancasila akan berarti hapusnya eksistensi Negara Kesatuan R.I., Proklamasi 17 Agustus 1945. Maka secara politis dijawab dengan kehendak untuk tidak merubah Pancasila, dalam hal ini terutama merubah Pembukaan UUD 1945 (Doktrin 1 Notonagoro).

Di dalam perkembangan yang makin cepat geraknya dan jauh bentangannya dari tahun 1945, kiranya pendekatan politis itu perlu pula didukung dengan pendekatan substansial, dengan mengkaji dan menunjukkan bahwa cita-cita dan dalil-dalil yang ada di dalam Pembukaan itu memang masih tetap mempunyai relevansi, dan bahkan makin mempunyai relevansi.

Masalah Komparasi

Sekarang dunia dibentuk oleh cita-cita yang bermacam-macam. Karenanya juga diwarnai oleh interaksinya berbagai ideologi yang ada dimuka bumi ini. Di dalam interaksi tersebut dapat terjadi proses konfliktif, dapat terjadi proses *iuxtapositif*, dan dapat terjadi proses asosiatif. Di dalam perkembangan dunia yang bergerak cepat, kompleks dan berdimensi global, ada ideologi yang sifatnya implisit ada ideologi yang sifatnya eksplisit. Perbandingan ideologi menjadi makin terasa urgensinya. Oleh karena itu salah satu problem epistemologis saat ini

dan masa mendatang kiranya adalah tumbuhnya studi ideologi komparatif. Masalah ini tentu saja masalah kritik ideologi yang mendasar, dan untuk itu perlu makin dikemukakan kriteria atau tolok ukurnya untuk mengadakan penilaian, yang kiranya tidak lain adalah manusia dan kemanusiaan. Hal ini penting pula dalam kaitannya dengan ideologi tertentu dunia masa mendatang.

Pancasila sebagai Ideologi dan Falsafah

Bangsa Indonesia tidak jarang menerima secara *take for granted* bahwa Pancasila adalah ideologi. Namun dibalik ungkapan seperti ini terkandung masalah yang kompleks dan tidak sederhana, yang karenanya perlu dijernihkan pengertian Pancasila sebagai ideologi, dengan tentu saja membangun konsep yang jernih dan jelas mengenai ideologi itu sendiri. Di sini epistemologi menjadi penting, khususnya agar kita tidak sekedar ter-perangkap ke dalam definisi atau konsep ideologi tertentu dan sempit, seperti misalnya konsep ideologi versi Marx. Melalui epistemologi seseorang dapat menempatkan ideologi sebagai sebuah bagian dari evolusi pengetahuan manusia, dan membedakannya dengan ilmu, theologi, falsafah serta teknologi namun juga melihat hubungan antara satu dengan yang lainnya.

Begitu pula halnya dengan Pancasila sebagai falsafah. Kita tahu bahwa Pancasila tidak lahir sebagai sebuah falsafah yang sistematis. Pancasila adalah dasar negara yang mempunyai sifat filosofis, artinya memberikan landasan yang sifatnya mendasar. Pancasila bukan atau belum merupakan sebuah sistem falsafah. Untuk menjadi sistem falsafah tentulah ada berbagai persyaratan yang masih harus dipenuhi.

Pancasila sebagai Obyek Epistemologi

Dalam kaitan dengan adanya berbagai jenis pengetahuan, maka Pancasila dapat menjadi obyek dari refleksi epistemologi baik melalui jenis pengetahuan ilmiah, melalui telaah kefilosofatan ataupun melalui refleksi theologis, disamping di atas sudah kita bicarakan tentang berbagai studi ideologi komparatif. Kita perlu melihat perbedaan antara kegiatan yang satu dengan yang lain, dan menyadari hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

Epistemologi Pancasila

Kalau berbagai masalah di atas menempatkan Pancasila sebagai obyek permasalahan epistemologik, maka dalam bagian ini kita akan membahas Pancasila sebagai faktor yang memberikan spesifikasi kepada epistemologi. Sama seperti halnya ada epistemologi Kant, epistemologi Hegel, epistemologi Thomas Aquinas, epistemologi Positivistik, dan lain sebagainya, maka kita dapat pula berbicara mengenai epistemologi sebagai konsekuensi dari Pancasila sebagai pandangan kefilosofatan.

Dalam hal ini mungkin dapat dikemukakan bahwa Pancasila dapat diklasifikasikan ke dalam bangunan falsafah yang menempatkan eksistensi manusia sebagai basis ontologiknya. Manusia dengan segala dimensinya dan dengan segala kemungkinan proses aktualisasinya. Manusia yang mempunyai tugas eksistensi untuk mengembangkan derajat kemanusiaan melalui proses aktualisasi eksistensi di berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Manusia yang mempunyai sifat dialektis monodualis atau bahkan monopluralis.

Kalau manusia merupakan basis ontologis radikal, komprehensif dan integral dari Pancasila, maka dengan demikian hal tersebut juga mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologi, yang sesuai dengan Pancasila yaitu menempatkan epistemologi di dalam bangunan falsafah kemanusiaan.

Dengan kata lain, Pancasila mengandaikan pengetahuan sebagai bagian dari eksistensi dan koeksistensi manusia. Kebenaran, kepastian merupakan bagian yang terbentuk di dalam proses aktualisasi eksistensi dan koeksistensi tersebut. Kalau manusia itu merupakan inti dari konsep kebudayaan, maka epistemologi yang dijiwai oleh Pancasila adalah epistemologi yang menempatkan pengetahuan sebagai bagian dari perkembangan kebudayaan.

Epistemologi Pancasila adalah epistemologi yang menyadari bhineka tunggal ika sebagai metoda (**kompleksitas dan interdependensi**) dan menekankan dialektika positif walaupun menyadari pula adanya dialektika negatif sebagai kemungkinan di dalam proses aktualisasi eksistensi.

Epistemologi Pancasila (dan tentu saja juga ontologi Pancasila) merupakan sebuah pilihan atau sebuah alternatif yang dapat dikemukakan sebagai sumbangan kepada perkembangan epistemologi dewasa ini yang sedang mengalami krisis. Epistemologi yang dijiwai Pancasila adalah epistemologi yang di samping dibangun atas dasar epistemologi dasar juga harus diperkokoh oleh sistem falsafah kemanusiaan yang jelas dan kuat. Namun semua ini tentu harus didukung oleh kredibilitas Pancasila di dalam tingkat pelaksanaannya aktual.

Bagaimanapun Pancasila adalah sebuah ideologi eksplisitasi dan sistematisasi kefil-safatan mengenai Pancasila dapat memperkaya dan memperkuat aktualisasi Pancasila secara kritis reflektif terus menerus.

Sebagai ideologi yang harus diaktualisasikan dan diimplementasikan, metodologinya adalah strategi.